

KESIAPSIAGAAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA KEBAKARAN DI PERMUKIMAN PADAT PENDUDUK KAMPUNG MELAYU, JAKARTA TIMUR

CAESAR BAGHDAD SUZUKIANA

NPP. 32.0340

Provinsi DKI Jakarta

Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik

Email: caesarsuzuki193@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Agus Supriyadi Harahap, M.Si

ABSTRACT

(Problem Statement/Background (GAP): High-density settlements with semi-permanent buildings and substandard electrical installations increase vulnerability to fire hazards at Kampung Melayu, East Jakarta.. This study addresses the gap in fire preparedness, particularly the lack of community participation and awareness, despite the efforts of the local government and agencies such as the Fire Management Sub-Department. **Purpose:** This study aims to analyze the preparedness of both the government and the community in mitigating fire risks in Kampung Melayu, East Jakarta. **Method:** Using a qualitative descriptive method, this study evaluates preparedness based on five dimensions proposed by LIPI-UNESCO: public knowledge and attitudes, policies and guidelines, emergency response plans, early warning systems, and resource mobilization. Data were collected through interviews, observations, and document analysis, involving government officials, community members, and fire volunteers. **Result:** The findings reveal that community knowledge and participation in fire prevention efforts are still insufficient. Key issues include limited public awareness, low participation in mitigation programs, and inadequate technical skills in using fire prevention equipment. However, initiatives like community-based fire volunteer programs have contributed positively, although their effectiveness is constrained by financial and resource limitations. **Conclusion:** To improve fire disaster preparedness in Kampung Melayu, it is essential to enhance public education, increase the number of fire response personnel, improve infrastructure, and strengthen the community's involvement in fire prevention efforts. The development of a more effective early warning system and better resource mobilization are also crucial..

Keywords: Community Preparedness, Fire Disaster Mitigation, Fire Prevention, Kampung Melayu, Public Participation, Transparency.,

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Permukiman dengan bangunan semi permanen dan instalasi listrik yang tidak memenuhi standar meningkatkan kerentanan terhadap kebakaran di Kampung Melayu, Jakarta Timur. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi risiko kebakaran di Kampung Melayu, Jakarta Timur. **Metode:** Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini, dengan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian ini mengacu pada lima dimensi kesiapsiagaan yang diajukan oleh LIPI-UNESCO, yaitu pengetahuan dan sikap masyarakat, kebijakan dan pedoman, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, serta mobilisasi sumber daya. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran masih terbatas. Tantangan utama termasuk rendahnya kesadaran masyarakat, partisipasi yang

rendah dalam program mitigasi, serta keterbatasan keterampilan teknis dalam menggunakan peralatan pencegah kebakaran. Namun, inisiatif seperti program relawan kebakaran berbasis masyarakat memberikan kontribusi positif, meskipun efektivitasnya terbatas oleh keterbatasan dana dan sumber daya. **Kesimpulan:** Untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana kebakaran di Kampung Melayu, perlu dilakukan peningkatan sosialisasi, penambahan jumlah personel pemadam kebakaran, perbaikan infrastruktur, serta penguatan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Pengembangan sistem peringatan dini yang lebih efektif serta mobilisasi sumber daya yang lebih baik juga sangat diperlukan.

Kata kunci: Kampung Melayu, Kesiapsiagaan Masyarakat, Mitigasi Bencana Kebakaran, Partisipasi Masyarakat, Pencegahan Kebakaran, Transparansi.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

DKI Jakarta merupakan salah satu provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta, jumlah penduduk Jakarta pada tahun 2023 tercatat sebanyak 11.337.556 jiwa dengan luas wilayah 661,5 km², yang menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 16.165 jiwa per km². Sebagai perbandingan, beberapa provinsi besar di Indonesia memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah, seperti Jawa Barat (1.346 jiwa per km²), Jawa Timur (870 jiwa per km²), dan Kalimantan Timur (32 jiwa per km²). Tingginya angka kepadatan penduduk ini meningkatkan ancaman bencana, khususnya kebakaran, yang dapat berdampak sangat besar terhadap masyarakat.

Permukiman padat penduduk, terutama yang memiliki karakteristik kumuh atau semi-permanen, menjadi area yang rentan terhadap kebakaran. Kawasan dengan permukiman padat dan bangunan yang tidak memenuhi standar keselamatan kebakaran menjadi penyebab utama tingginya frekuensi kebakaran. Jakarta, sebagai kota dengan kepadatan tinggi, sering mengalami kebakaran di permukiman padat, yang tidak hanya merugikan secara materi, tetapi juga berisiko menimbulkan korban jiwa. Menurut data dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, kebakaran di permukiman padat menjadi penyebab utama kerugian, dengan tren kebakaran yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 1.1

Tren Kebakaran di Jakarta Timur 2020-2021 berdasarkan Sumber Penyebab Kebakaran

Penyebab Kebakaran	Jumlah 2020	Kasus 2021	Persentase Kenaikan (%)
Listrik	938	1,032	10%
Gas	180	154	-14.4%
Sampah Dibakar	123	109	-11.4%
Putung Rokok	36	42	+16.7%

Sumber : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta 2022

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kebakaran akibat listrik menjadi masalah utama yang harus segera ditangani, dengan peningkatan signifikan antara tahun 2020 dan 2021. Data ini

mengindikasikan bahwa ancaman kebakaran semakin besar dan kesadaran masyarakat mengenai penyebab kebakaran harus ditingkatkan.

Di Jakarta Timur, kawasan permukiman padat, terutama yang terdapat di Kelurahan Kampung Melayu, merupakan daerah dengan risiko kebakaran yang tinggi. Kepadatan penduduk di Kampung Melayu mencapai 68.713 jiwa per km², dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan kelurahan lain di Kecamatan Jatinegara. Permukiman yang terletak di area dengan akses jalan sempit dan instalasi listrik yang tidak sesuai standar meningkatkan kerentanannya terhadap kebakaran. Pada tanggal 25 Agustus 2021, Kampung Pulo III RT05/03 Kampung Melayu mengalami kebakaran besar yang disebabkan oleh korsleting listrik, yang mengakibatkan 66 Kepala Keluarga (KK) dan 77 jiwa menjadi korban. Meskipun tidak ada korban jiwa, 99 jiwa kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran tersebut.

Tingginya risiko kebakaran ini menuntut adanya kesiapsiagaan yang baik dari pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi dampak dari bencana. Pemulihan pasca bencana dan tanggap darurat membutuhkan juga dana/anggaran yang tidak sedikit. (Ginting & Dewi, 2020) Kesiapsiagaan merupakan faktor utama dalam penanggulangan bencana, dan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan sistem mitigasi yang lebih efektif. Kolaborasi ini tidak hanya terbatas pada upaya mitigasi, tetapi juga meliputi upaya preventif, salah satunya melalui pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan tentang kebakaran dan kesiapsiagaan evakuasi.

Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini berfokus pada evaluasi kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kebakaran di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana masyarakat dan pemerintah dapat beradaptasi dengan risiko kebakaran dan mengelola sumber daya untuk memitigasi dampak bencana. Penelitian ini akan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas resiliensi masyarakat dalam menghadapi kebakaran dan mengurangi kerugian materiil serta korban jiwa yang dapat ditimbulkan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Salah satu kesenjangan utama yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat resiliensi masyarakat dalam mitigasi bencana kebakaran, meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan kebakaran. Meskipun Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur telah melaksanakan sejumlah program mitigasi kebakaran dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, tingkat partisipasi masyarakat dan pemahaman terhadap risiko kebakaran di wilayah permukiman padat penduduk masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari tingginya jumlah kebakaran yang terjadi setiap tahun, terutama di kawasan yang memiliki akses terbatas dan infrastruktur yang kurang memadai.

Kesenjangan lainnya terletak pada kurangnya keterampilan teknis dan pemahaman masyarakat dalam menggunakan alat-alat mitigasi kebakaran yang disediakan, seperti alat pemadam api ringan (APAR) dan hydrant mandiri. Meskipun pelatihan dan sosialisasi telah diberikan, masih banyak warga yang belum sepenuhnya menguasai penggunaan alat tersebut secara efektif, sehingga ketika kebakaran terjadi, mereka kesulitan untuk merespons dengan cepat. Hal ini mengurangi efektivitas upaya mitigasi kebakaran dan memperburuk dampak bencana yang terjadi.

Selain itu, meskipun telah ada upaya untuk membangun kelompok relawan kebakaran (REDKAR) dan meningkatkan kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah, integrasi antara

berbagai elemen dalam mitigasi kebakaran, seperti petugas pemadam kebakaran, tokoh masyarakat, dan warga, masih belum sepenuhnya terwujud. Keterbatasan koordinasi ini menyebabkan respons yang kurang optimal ketika kebakaran terjadi, yang pada gilirannya meningkatkan risiko kerugian materiil dan korban jiwa.

Kesenjangan berikutnya adalah keterbatasan sistem informasi yang mendukung mitigasi kebakaran di wilayah permukiman padat penduduk. Saat ini, belum ada sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses data terkait risiko kebakaran, pelatihan kebakaran, dan prosedur evakuasi. Sistem informasi yang terintegrasi dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan kecepatan respons dalam menghadapi kebakaran.

Lebih lanjut, meskipun terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mitigasi kebakaran, masih terdapat kendala dalam membangun resiliensi yang berkelanjutan di tingkat komunitas. Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan penyebaran informasi dan rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa wilayah, yang membuat pengurangan risiko kebakaran sulit untuk dicapai secara efektif.

Penelitian terkait resiliensi masyarakat dalam mitigasi kebakaran di Jakarta Timur masih terbatas, khususnya yang mengkaji secara mendalam tentang pengelolaan risiko kebakaran, keterlibatan masyarakat, dan pemanfaatan teknologi dalam mitigasi kebakaran. Hal ini menciptakan research gap yang perlu diisi, yaitu bagaimana kebijakan mitigasi kebakaran dan implementasi sistem informasi dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kapasitas resiliensi masyarakat di daerah dengan tantangan mitigasi kebakaran yang kompleks.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya ini ditulis untuk membandingkan penelitian ini dengan penelitian terkait yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Adapun hal tersebut dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan sekarang bersifat orisinal dan tidak menjiplak penelitian terdahulu yang terkait. Beberapa penelitian sebelumnya tercantum dibawah ini.

Penelitian terdahulu yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Taryana *et al* (2022) dengan judul Analisis Kesiapsiagaan Banjir Di Jakarta. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan indikator kesiapsiagaan oleh LIPI-UNESCO (2006). Berdasarkan penelitian mendapatkan kesimpulan yakni, pemerintah daerah DKI Jakarta sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi banjir. Sehingga, kesiapsiagaan DKI Jakarta terhadap banjir sudah dilakukan dengan baik dilihat dari terpenuhinya kelima paramater kesiapsiagaan LIPI-UNESCO.

Erlia *et al* (2017) juga melakukan penelitian mengenai kesiapsiagaan dengan judul Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah Menghadapi Bencana Banjir di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesiapsiagaan oleh Dodon. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan yaitu Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pemerintah berada pada tingkat sedang.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayanto (2020) dengan judul Pengetahuan dan Sikap Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana Banjir. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teori kesiapsiagaan oleh Dodon. Dari penelitian mendapatkan kesimpulan yakni jumlah masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan kesiapsiagaan baik sebanyak 36 orang (36,4%), sedangkan jumlah masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan kesiapsiagaan kurang sebanyak 63 orang (63%).

Dan jumlah masyarakat yang memiliki sikap kesiapsiagaan baik sebanyak 46 orang (46,5%), sedangkan jumlah masyarakat yang memiliki sikap kesiapsiagaan kurang sebanyak 53 orang (53,5%)

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Trifianingsih *et al* (2022) dengan judul Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Kebakaran di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teori dari LIPI-UNESCO. Hasil penelitian kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Pekauman RT.09 RW.01 Banjarmasin dalam menghadapi bencana kebakaran menunjukkan bahwa mayoritas responden dalam kategori sangat siap sebanyak 44 (59,5%) dan paling sedikit berada dalam kategori hampir siap sebanyak 7 (9,5%).

Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah Atelia *et al* (2022) Dengan judul Analisis Kesiapsiagaan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir di Wilayah Kampung Melayu Kota Jakarta Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teori dari . Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Kesiapsiagaan masyarakat di Kampung melayu, Jakarta timur dalam menghadapi banjir dinilai belum optimal terutama pada dimensi pengetahuan masyarakat dikarenakan kurangnya edukasi dari pemerintah sehingga menimbulkan sifat apatis terhadap bencana

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini menawarkan kebaruan ilmiah yang signifikan dengan fokus spesifik pada kesiapsiagaan masyarakat dalam mitigasi kebakaran di permukiman padat penduduk menggunakan pendekatan yang mengadaptasi dimensi kesiapsiagaan LIPI-UNESCO (2006). Dimensi yang mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat, kebijakan dan pedoman, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, dan mobilisasi sumber daya ini memberikan gambaran yang lebih holistik mengenai kesiapsiagaan bencana kebakaran. Meskipun sejumlah penelitian terdahulu telah membahas mitigasi kebakaran dan kesiapsiagaan masyarakat, penelitian ini menjadi salah satu yang pertama yang secara spesifik menganalisis kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk di Jakarta Timur dengan menggunakan kerangka dimensi kesiapsiagaan yang komprehensif. Keunikan ini sangat penting mengingat tantangan yang dihadapi oleh wilayah tersebut, seperti tingginya kepadatan penduduk dan keterbatasan infrastruktur, yang memerlukan pendekatan mitigasi yang berbeda dibandingkan dengan daerah lainnya.

Jika dibandingkan dengan penelitian Taryana *et al.* (2022), yang mengkaji kesiapsiagaan terhadap bencana banjir, penelitian ini menekankan pada kesiapsiagaan terhadap kebakaran yang memerlukan penanganan yang sangat berbeda. Taryana *et al.* menilai kesiapsiagaan dalam menghadapi banjir menggunakan indikator LIPI-UNESCO, tetapi penelitian tersebut tidak mencakup faktor-faktor risiko kebakaran yang spesifik, terutama di permukiman padat penduduk yang memiliki kerentanan yang lebih tinggi terhadap kebakaran daripada bencana banjir. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi yang berbeda dan lebih terfokus pada mitigasi kebakaran di Jakarta Timur, yang sebelumnya belum cukup mendapat perhatian dalam penelitian banjir yang lebih luas.

Penelitian Erlia *et al.* (2017) mengenai kesiapsiagaan bencana banjir di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar menggunakan pendekatan teori kesiapsiagaan oleh Dodon. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah berada pada tingkat sedang. Meskipun demikian, penelitian Erlia tidak memberikan analisis yang mendalam terkait kesiapsiagaan kebakaran, khususnya di kawasan dengan kepadatan

penduduk yang tinggi dan risiko kebakaran yang lebih besar. Berbeda dengan Erlia, penelitian ini mengadaptasi lima dimensi kesiapsiagaan, dengan fokus lebih luas pada aspek kebijakan mitigasi kebakaran, yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas respon kebakaran di permukiman padat seperti Kampung Melayu.

Sementara itu, Hidayanto (2020) mengkaji pengetahuan dan sikap kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir dan menyimpulkan bahwa banyak masyarakat yang memiliki pengetahuan rendah mengenai kesiapsiagaan bencana. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak cukup siap menghadapi banjir, meskipun sudah ada program pelatihan. Di sisi lain, penelitian ini memberikan penekanan yang lebih besar pada kesiapsiagaan terhadap kebakaran, yang membutuhkan keterlibatan lebih aktif dari masyarakat dalam menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) dan peran serta masyarakat dalam simulasi kebencanaan. Penelitian kita secara mendalam menganalisis keterampilan praktis masyarakat dalam menangani kebakaran, yang menjadi faktor kunci dalam mitigasi kebakaran yang efektif, berbeda dengan penelitian Hidayanto yang lebih menitikberatkan pada pengetahuan teoritis mengenai banjir.

Trifianingsih et al. (2022) dalam penelitiannya mengenai kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana kebakaran di Kota Banjarmasin menemukan bahwa mayoritas responden berada dalam kategori sangat siap. Namun, penelitian ini hanya mencakup aspek teknis kesiapsiagaan dan tidak memperhatikan hambatan sosial dan struktural yang dihadapi masyarakat dalam mengimplementasikan mitigasi kebakaran. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun kesiapsiagaan tinggi di Banjarmasin, tantangan dalam koordinasi antara berbagai pihak, serta kurangnya pemahaman teknis masyarakat dalam penggunaan alat pemadam, adalah kendala yang mengurangi efektivitas respons kebakaran. Berbeda dengan Trifianingsih, penelitian ini tidak hanya mengkaji sikap masyarakat, tetapi juga secara mendalam menilai hambatan struktural dan sosial yang menghalangi penerapan kebijakan mitigasi kebakaran di kawasan padat penduduk.

Fadhilah Atelia et al. (2022) meneliti kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir di Kampung Melayu, Jakarta Timur, yang menunjukkan kesiapsiagaan masyarakat masih belum optimal, terutama dalam hal pengetahuan masyarakat mengenai risiko banjir. Meskipun demikian, penelitian ini tidak membahas kesiapsiagaan terhadap bencana kebakaran, yang merupakan isu kritis di kawasan dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi seperti Kampung Melayu. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa sosialisasi terhadap bencana banjir kurang maksimal, tetapi hal ini berbeda dengan penelitian kita yang lebih fokus pada kesiapsiagaan terhadap kebakaran, termasuk evaluasi tentang sistem peringatan dini, serta mobilisasi sumber daya yang dapat meningkatkan kesiapsiagaan kebakaran di daerah padat penduduk.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengisi kesenjangan penelitian yang ada dengan fokus lebih mendalam pada kebakaran di permukiman padat penduduk, mengkaji kendala sosial yang dihadapi masyarakat, dan menilai kebijakan mitigasi kebakaran yang telah diterapkan. Penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan kebijakan, tetapi juga hambatan yang dihadapi dalam penerapannya, memberikan kontribusi baru yang tidak ditemukan dalam penelitian terdahulu yang lebih banyak berfokus pada aspek teknis atau banjir. Penelitian ini menawarkan rekomendasi berbasis temuan empiris yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan kapasitas mereka dalam mengatasi risiko kebakaran, yang akan berguna bagi pemerintah dan daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi risiko kebakaran di Kampung Melayu, Jakarta Timur.

II. METODE

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk menggali informasi secara mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapsiagaan masyarakat dalam mitigasi kebakaran di permukiman padat penduduk, khususnya di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk mengeksplorasi pengalaman, tantangan, serta upaya-upaya yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengurangi risiko kebakaran di daerah tersebut. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi faktual yang ada, kebijakan yang diterapkan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan risiko kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk seperti Kampung Melayu.

Metode kualitatif deskriptif ini juga memungkinkan peneliti untuk menggambarkan secara komprehensif tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan mitigasi kebakaran di Kampung Melayu, serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas upaya mitigasi kebakaran di Jakarta Timur. Menurut Nurdin dan Hartati (2019:42), metode kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi kondisi objek secara alami, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses penelitian. Simangunsong (2017:190) juga mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dapat menyesuaikan dengan dinamika lapangan, yang memungkinkan peneliti untuk mengakomodasi perubahan informasi selama pengumpulan data.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan dan menganalisis data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara semi-terstruktur digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan dari pejabat terkait di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta, tokoh masyarakat, serta warga sekitar Kampung Melayu mengenai kebijakan mitigasi kebakaran, kesiapsiagaan masyarakat, dan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi risiko kebakaran. Observasi dilakukan untuk memantau implementasi kebijakan mitigasi kebakaran dan kesiapsiagaan masyarakat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan mitigasi kebakaran di Kampung Melayu. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, termasuk kebijakan mitigasi kebakaran, laporan tahunan, dan temuan terkait kebakaran dari pihak terkait.

Informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, tokoh masyarakat yang aktif dalam program mitigasi kebakaran, serta warga yang tinggal di permukiman padat di Jakarta Timur. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik Purposive Sampling, yaitu memilih individu yang memiliki pemahaman mendalam mengenai kebijakan mitigasi kebakaran dan kesiapsiagaan masyarakat. Teknik ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada peran aktor kunci dalam mitigasi kebakaran yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait kebijakan dan implementasi program di tingkat daerah. Sedangkan informan pendukung dipilih menggunakan teknik Snowball Sampling, yaitu melalui rekomendasi dari informan utama untuk menggali pandangan

masyarakat atau pihak terkait yang memiliki informasi relevan mengenai mitigasi kebakaran di kawasan tersebut.

Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI Jakarta, serta beberapa lokasi yang terkait dengan program mitigasi kebakaran, seperti permukiman padat penduduk di Jakarta Timur, lokasi-lokasi yang sering terjadi kebakaran, serta posko-relawan kebakaran. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif menurut Miles dan Huberman (2014), yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat efektivitas kebijakan mitigasi kebakaran, serta memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan resiliensi masyarakat dalam menghadapi risiko kebakaran kesiapsiagaan dan resiliensi masyarakat di Kampung Melayu dalam menghadapi risiko kebakaran.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Penjelasan ini mengacu pada lima dimensi kesiapsiagaan menurut LIPI-UNESCO, yaitu pengetahuan dan sikap, kebijakan dan pedoman, rencana tanggap darurat, sistem peringatan dini, dan mobilitas sumber daya, yang secara keseluruhan dapat menggambarkan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat di Kampung Melayu dalam menghadapi bencana kebakaran.

3.1. Pengetahuan dan Sikap Terhadap Risiko Kebakaran

a. Pengetahuan Masyarakat Terkait Risiko Kebakaran

Indikator pertama dalam dimensi ini adalah pengetahuan masyarakat Kampung Melayu tentang risiko kebakaran di permukiman padat. Analisis kerentanannya memberikan gambaran yang lebih jelas tentang potensi dampak bencana dan bagaimana langkah mitigasi dapat dioptimalkan (Shadmaan & Popy, 2023). Meskipun berbagai upaya sosialisasi telah dilakukan, terdapat hambatan dalam penyebaran informasi yang efektif kepada seluruh lapisan masyarakat. Pendekatan komunikasi lingkungan yang efektif dapat memperkuat upaya mitigasi kebakaran, dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan partisipasi dalam pengurangan risiko bencana (Yasir *et al*, 2023)

Untuk menggali pengetahuan ini, peneliti melakukan wawancara dengan aparaturnya pemerintah terkait, seperti Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, tokoh masyarakat, serta warga di Kampung Melayu. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Operasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada 10 Januari 2025, diungkapkan bahwa:

Secara umum, masyarakat sudah memiliki pengetahuan tentang kebakaran melalui program sosialisasi yang dilakukan oleh pemadam kebakaran, baik secara langsung maupun melalui program woro-woro dan stikerisasi."

Program woro-woro adalah salah satu bentuk kegiatan sosialisasi yang dilakukan pemadam kebakaran dengan cara berkeliling untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyebab kebakaran, seperti pentingnya instalasi listrik yang sesuai standar, serta mengingatkan masyarakat tentang bahaya kebakaran.

Sementara stikerisasi adalah program di mana stiker yang berisi informasi mengenai nomor hotline kebakaran, yaitu 112, ditempel di tempat-tempat strategis di lingkungan.

Pernyataan ini didukung oleh pengurus Satuan Tugas Pemadam Kebakaran Jatinegara yang mengatakan bahwa:

"Pengetahuan masyarakat di Kampung Melayu sudah cukup baik mengenai kebakaran. Kami memanfaatkan acara kelurahan seperti Juru Pemantau Jentik (JUMANTIK) setiap hari Jumat untuk sosialisasi."

Namun, meskipun sebagian besar masyarakat Kampung Melayu sudah memahami tentang penyebab kebakaran, hasil wawancara dengan warga RW 3 dan RW 5 menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat secara langsung mengikuti sosialisasi tersebut. Salah seorang warga di RW 3 yang pernah mengalami kebakaran pada 2021 menyatakan:

"Saya dan keluarga belum pernah ikut sosialisasi soal kebakaran. Tapi saya tahu kebakaran itu bahaya, terutama setelah pernah mengalaminya sendiri. Saya tahu listrik dan kompor harus hati-hati, tapi saya tidak paham langkah-langkah penanganan kebakaran secara lengkap."

Hal serupa juga disampaikan oleh warga di RW 5 yang mengatakan bahwa meskipun mereka tahu kebakaran bisa disebabkan oleh instalasi listrik yang jelek atau kelalaian, mereka merasa belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai cara penanggulangan kebakaran yang efektif.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Kampung Melayu, disampaikan bahwa:

"Program pelatihan dan sosialisasi dilakukan setiap tahun secara rutin, namun keterbatasan anggaran menyebabkan sosialisasi lebih difokuskan pada pengurus RT/RW dan relawan kebakaran, yang diharapkan bisa menyampaikan informasi kepada warga."

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang telah dilaksanakan dengan efektivitas penyampaian kepada seluruh masyarakat, yang mengarah pada kebutuhan untuk memperluas cakupan sosialisasi kepada seluruh warga Kampung Melayu. Sosialisasi dan edukasi dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan masyarakat dalam menghadapi kebakaran. (Muhammad Makky Yahusafat *et al*, 2020)

b. Sikap dan Keterampilan Masyarakat Dalam Menghadapi Kebakaran

Sikap dan keterampilan masyarakat merupakan aspek penting dalam menilai kesiapsiagaan mereka dalam menghadapi kebakaran. Dengan sikap yang tepat, kebakaran bisa lebih cepat ditangani oleh masyarakat sebelum bantuan dari pemadam kebakaran datang. Berbagai pelatihan kepada relawan kebakaran serta pembentukan Sistem Keamanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di tingkat kelurahan merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk meningkatkan keterampilan masyarakat dalam menghadapi kebakaran. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Operasi pada 10 Januari 2025, dikatakan bahwa: "Sikap masyarakat di permukiman sudah kooperatif dan banyak yang membantu petugas pemadam kebakaran. Namun, ada

beberapa sikap yang menghambat, seperti ketidakpedulian terhadap pentingnya memiliki sistem proteksi kebakaran." Sikap masyarakat yang kooperatif sangat membantu dalam proses pemadaman kebakaran, meskipun beberapa warga cenderung mengabaikan langkah-langkah pencegahan kebakaran. Selain itu, keterampilan masyarakat dalam menggunakan alat pemadam api ringan (APAR) masih terbatas, dan banyak yang belum tahu cara penggunaannya dengan benar. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan yang lebih intensif mengenai penggunaan alat pemadam kebakaran dan langkah-langkah keselamatan dalam menghadapi kebakaran. Dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia ini tentunya diperlukan kolaborasi yang baik antar pihak masyarakat, pemerintah maupun swasta. Maulidia *et al* (2020) Sikap dan keterampilan masyarakat memainkan peran penting dalam kesiapsiagaan menghadapi kebakaran. Meskipun sebagian warga Kampung Melayu sudah menunjukkan sikap kooperatif dan siap membantu proses pemadaman, masih terdapat hambatan seperti kurangnya kepedulian terhadap sistem proteksi kebakaran dan keterbatasan keterampilan dalam menggunakan APAR. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan yang lebih intensif serta kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pihak swasta untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mencegah dan menangani kebakaran secara mandiri dan efektif.

3.2. Kebijakan dan Pedoman

Kebijakan merupakan elemen penting dalam kesiapsiagaan menghadapi kebakaran. Pemerintah DKI Jakarta telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait penanggulangan kebakaran, termasuk di Kelurahan Kampung Melayu. Keikutsertaan masyarakat menjadi kunci dalam penanggulangan kebakaran untuk memberdayakan warga dalam mengurangi risiko kebakaran.

Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2008 mengatur kewajiban pemilik bangunan untuk menyediakan sarana keselamatan seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sistem deteksi kebakaran, dan aksesibilitas bagi petugas pemadam. Perda ini juga menekankan peran serta masyarakat melalui pembentukan Sistem Keamanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) di tingkat RW dan kelurahan.

Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, dan pengelolaan sumber daya di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Seksi Pencegahan bertanggung jawab atas sosialisasi dan pelatihan, sementara Seksi Operasi berfokus pada penanggulangan kebakaran.

Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2023 mengatur pembentukan Relawan Kebakaran di setiap kelurahan sebagai bagian dari SKKL, dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Relawan akan dilatih oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam penggunaan APAR, teknik pemadaman, dan evakuasi darurat.

Untuk mendukung implementasi Perda No. 8 Tahun 2008 dan Pergub No. 42 Tahun 2023, Keputusan Lurah Kampung Melayu Nomor 35 Tahun 2024 dibentuk untuk memperkuat peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran dengan pembentukan relawan kebakaran di tingkat kelurahan.

Kebijakan-kebijakan ini telah diimplementasikan dengan baik dan mendorong partisipasi

aktif masyarakat dalam mengurangi risiko kebakaran, dengan koordinasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat

3.3. Rencana Tanggap Darurat

Rencana tanggap darurat adalah elemen penting dalam kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi kebakaran. Rencana ini berfungsi sebagai pedoman dalam menghadapi bencana dengan langkah-langkah yang sudah disiapkan sebelumnya. Pemerintah DKI Jakarta, melalui Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat), telah menyusun berbagai prosedur untuk memastikan bahwa setiap tahap penanganan kebakaran dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Di Kelurahan Kampung Melayu, rencana tanggap darurat dikembangkan dengan melibatkan semua pihak terkait, mulai dari masyarakat setempat, pengurus RT/RW, hingga petugas pemadam kebakaran. Hal ini mencakup prosedur evakuasi, koordinasi antar lembaga terkait, serta identifikasi titik rawan kebakaran di wilayah permukiman padat. Rencana ini juga mencakup pemetaan sumber daya yang tersedia, seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), sumber air, serta jalur evakuasi yang jelas. Pelatihan dan simulasi kebakaran juga menjadi bagian dari rencana tanggap darurat yang dilaksanakan secara berkala. Masyarakat Kampung Melayu diberi pelatihan tentang langkah-langkah evakuasi yang tepat dan cara-cara memadamkan api kecil menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Rencana tanggap darurat ini membantu memastikan bahwa respons terhadap kebakaran dapat dilakukan secara terkoordinasi dan terencana dengan baik.

Rencana tanggap darurat di Kampung Melayu merupakan strategi kesiapsiagaan yang terstruktur dan melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat hingga instansi pemerintah. Pemerintah DKI Jakarta melalui Gulkarmat telah menyusun prosedur penanganan kebakaran yang mencakup evakuasi, koordinasi antar lembaga, pemetaan sumber daya, serta pelatihan dan simulasi kebakaran secara berkala. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dan penguatan kapasitas lokal, rencana ini memastikan respons kebakaran dilakukan secara cepat, efektif, dan terkoordinasi.

3.4. Sistem Peringatan Dini

Sistem peringatan dini merupakan bagian penting dari kesiapsiagaan untuk mengurangi dampak kebakaran. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan alat penilaian manajemen bencana, yang dapat memberikan wawasan penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan tenaga medis dalam menghadapi situasi darurat.(Elshami, *et al* 2025)

Selain pengetahuan dan sikap kesiapsiagaan, sistem peringatan yang baik juga sangat diperlukan untuk meminimalkan jumlah korban bencana.(Apriyansa *et al*, 2021). Penggunaan teknologi sensor nirkabel di area padat penduduk dapat meningkatkan deteksi dini kebakaran, memberikan kontribusi besar terhadap upaya mitigasi kebakaran yang lebih efektif (Fath *et al* , 2023).

Teknologi modifikasi cuaca memiliki potensi besar dalam mengurangi risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama dalam konteks pengurangan emisi karbon yang berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim (Harsoyo *et al.*, 2023)

Di Kampung Melayu, sistem peringatan dini yang diterapkan oleh pemerintah DKI Jakarta berfokus pada pengawasan terhadap faktor risiko kebakaran, seperti instalasi listrik yang tidak terstandarisasi, pembakaran sampah sembarangan, dan penggunaan bahan mudah terbakar di area permukiman. Salah satu bentuk peringatan dini yang diterapkan adalah melalui

program woro-woro, di mana petugas pemadam kebakaran secara rutin berkeliling ke lingkungan permukiman untuk memberikan informasi mengenai pencegahan kebakaran. Selain itu, teknologi seperti alarm kebakaran dan aplikasi pelaporan kebakaran juga mulai diperkenalkan untuk meningkatkan respons cepat terhadap potensi kebakaran. Sistem peringatan dini ini bertujuan untuk memberikan peringatan kepada masyarakat secepat mungkin sehingga tindakan pencegahan dapat segera dilakukan sebelum kebakaran menyebar lebih luas. Kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang peringatan dini kebakaran juga diperkuat dengan bantuan dari sistem SKKL (Sistem Keamanan Kebakaran Lingkungan) yang telah dibentuk di tingkat RT dan RW. Masyarakat juga diajarkan untuk mengenali tanda-tanda awal kebakaran dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menghindari kebakaran yang lebih besar. Program peringatan dini ini mencakup pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan keterlibatan aktif warga dalam menjaga keamanan lingkungan mereka.

3.5. Mobilitas Sumber Daya

Mobilitas sumber daya adalah salah satu dimensi kunci dalam kesiapsiagaan menghadapi kebakaran. Di Kampung Melayu, mobilitas sumber daya dalam konteks kebakaran melibatkan dua aspek utama: ketersediaan dan distribusi sumber daya yang dibutuhkan untuk penanggulangan kebakaran, serta koordinasi antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait. Pemerintah daerah telah mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk penanggulangan kebakaran, seperti APAR, alat pemadam kebakaran, serta pelatihan untuk relawan kebakaran yang merupakan bagian dari SKKL. Relawan ini dilatih untuk dapat bertindak cepat dalam merespons kebakaran, dengan menggunakan peralatan yang sudah disediakan dan mengoordinasikan respon dengan pihak berwenang. Sumber daya lain yang menjadi bagian dari mobilitas ini adalah sumber air untuk pemadaman kebakaran. Di kawasan Kampung Melayu yang padat, pemerintah telah menyiapkan beberapa sumber air yang mudah diakses, termasuk jaringan pipa air yang dapat digunakan dalam kondisi darurat. Selain itu, keberadaan posko-relawan kebakaran di beberapa titik strategis juga mendukung mobilitas sumber daya ini dengan menyediakan tempat yang terorganisir untuk penanggulangan kebakaran secara lokal. Mobilitas sumber daya juga mencakup koordinasi antara dinas terkait dan masyarakat, terutama dalam memastikan bahwa kebijakan mitigasi kebakaran dapat dijalankan dengan efektif. Sumber daya manusia yang terlatih, seperti relawan kebakaran, menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam merespons kebakaran tanpa harus menunggu bantuan dari petugas pemadam kebakaran.

Selain itu, keberhasilan mobilitas sumber daya dalam penanggulangan kebakaran di Kampung Melayu juga sangat bergantung pada sistem komunikasi yang efektif dan responsif. Dalam situasi darurat, kecepatan penyebaran informasi menjadi krusial untuk memastikan bahwa semua elemen, mulai dari warga hingga relawan dan dinas terkait, dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan. Untuk itu, pemerintah daerah bersama lembaga terkait telah mengembangkan sistem peringatan dini berbasis teknologi, seperti grup pesan instan dan aplikasi pelaporan kebakaran, yang memungkinkan pelaporan dan koordinasi dilakukan secara real-time. Keberadaan sistem ini memperkuat jejaring komunikasi antar warga dan petugas, serta mempercepat aktivasi respon kebakaran, sehingga potensi kerugian dapat diminimalisir secara lebih efektif.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sama halnya dengan temuan penelitian Taryana *et al* (2022) yang menunjukkan bahwa pemerintah DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, penelitian ini juga menerima temuan tersebut bahwa ada berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan banjir, namun penelitian ini menolak temuan tersebut karena kesiapsiagaan masyarakat di Kampung Melayu masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh kendala-kendala dalam distribusi informasi dan pelaksanaan program sosialisasi yang belum maksimal. Meskipun ada kebijakan mitigasi kebakaran, kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran di Kampung Melayu masih menghadapi banyak hambatan, terutama dalam pemahaman teknis dan keterbatasan fasilitas yang tersedia.

Berbeda dengan temuan penelitian (Erlia *et al* (2017) , yang menyatakan bahwa kesiapsiagaan masyarakat dan pemerintah berada pada tingkat sedang dalam menghadapi bencana banjir, penelitian ini menolak temuan tersebut karena di Kampung Melayu Kabupaten Banjar, kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran masih jauh dari memadai. Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai prosedur evakuasi kebakaran dan kurangnya partisipasi dalam pelatihan kebencanaan yang diadakan oleh pemerintah.

Temuan ini memperkuat penelitian oleh Hidayanto (2020), yang menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana sering kali rendah. Penelitian ini juga menerima temuan tersebut, bahwa sebagian besar masyarakat di Kampung Melayu tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk merespons kebakaran secara efektif. Sebagian besar warga hanya memiliki pengetahuan dasar mengenai kebakaran, yang diperoleh dari pengalaman pribadi atau informasi dari tetangga dan media, bukan dari pelatihan yang terstruktur dan sistematis.

Berbeda dengan temuan penelitian Trifianingsih *et al* (2022) yang menyatakan bahwa mayoritas responden di Banjarmasin dalam kategori sangat siap (59,5%) dalam menghadapi kebakaran, penelitian ini menolak temuan tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di Kampung Melayu, kesiapsiagaan masyarakat masih sangat rendah, dengan banyak warga yang belum terlibat dalam pelatihan atau kegiatan simulasi kebencanaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang diterapkan dengan tingkat kesadaran masyarakat.

Temuan ini juga menegaskan bahwa, seperti dalam penelitian oleh Fadhilah Atelia *et al* (2022) yang menyimpulkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat di Kampung Melayu, Jakarta Timur masih belum optimal karena kurangnya edukasi dari pemerintah, penelitian ini menerima temuan tersebut dan menolak penelitian sebelumnya dengan menekankan bahwa di Kampung Melayu, pendidikan kebencanaan masih kurang efektif. Program sosialisasi dan pelatihan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di area permukiman yang lebih padat.

Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat dan menguatkan berbagai studi sebelumnya mengenai pentingnya pendidikan, pelatihan, dan penguatan sistem peringatan dini dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap kebakaran. Namun, temuan ini juga menegaskan bahwa implementasi program kesiapsiagaan di daerah padat penduduk seperti Kampung Melayu harus disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat agar program tersebut dapat diterima dan diimplementasikan dengan efektif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis kesiapsiagaan masyarakat dalam mitigasi kebakaran di permukiman padat penduduk Kampung Melayu, Jakarta Timur, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Risiko Kebakaran Kesiapsiagaan masyarakat di Kampung Melayu dalam menghadapi risiko kebakaran masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai risiko kebakaran, kurangnya pengetahuan tentang prosedur evakuasi, serta minimnya partisipasi dalam kegiatan pelatihan kebencanaan atau simulasi kebakaran yang telah dilakukan oleh pemerintah. Meskipun beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, masih ada tantangan besar dalam memastikan bahwa masyarakat dapat mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi kebakaran secara mandiri.

Keterbatasan Pengetahuan dan Pemahaman Pengetahuan masyarakat tentang kebakaran dan upaya mitigasinya masih terbatas, meskipun ada upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur. Banyak warga yang belum sepenuhnya memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran, dan sebagian besar hanya memiliki pengetahuan dasar. Meskipun telah ada pelatihan dan program sosialisasi, distribusi informasi yang terbatas menjadi hambatan utama, terutama bagi mereka yang belum berpartisipasi langsung dalam kegiatan tersebut.

Keterlibatan Masyarakat dalam Program Mitigasi Kebakaran Upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, seperti pembentukan tim relawan kebakaran (REDKAR), telah dilakukan, namun partisipasi aktif dari masyarakat masih rendah. Banyak warga yang belum terlibat dalam kegiatan mitigasi kebakaran atau pelatihan kebencanaan. Program ini juga terbatas oleh faktor anggaran, yang mengakibatkan kesulitan dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat di Kampung Melayu. Kurangnya koordinasi antara pemerintah dan masyarakat setempat juga menjadi tantangan besar dalam upaya mitigasi kebakaran yang lebih efektif.

Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal waktu dan ruang lingkup, yang hanya terfokus pada mitigasi kebakaran di Kampung Melayu, sebuah permukiman padat penduduk di Jakarta Timur. Selain itu, penggunaan purposive sampling dalam pemilihan informan membatasi generalisasi temuan penelitian ini.

Arah Masa Depan Penelitian (Future Work) Penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk mengevaluasi keberhasilan mitigasi kebakaran di wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda, khususnya di daerah yang memiliki infrastruktur yang lebih maju atau di wilayah yang lebih terpencil. Penelitian komparatif yang melibatkan beberapa daerah di Jakarta atau daerah lainnya di Indonesia dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana strategi mitigasi kebakaran berbasis komunitas dapat diterapkan secara lebih efektif di berbagai kondisi. Penelitian juga perlu menyoroti peran teknologi dan pelatihan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat untuk merespons kebakaran secara cepat dan efektif.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur beserta seluruh jajaran yang telah memberikan izin, dukungan, serta kesempatan yang sangat berarti dalam melaksanakan penelitian ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh informan, baik informan utama maupun pendukung, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang sangat berharga serta berbagi pengalaman selama proses pengumpulan data. Tanpa kontribusi dari para informan, penelitian ini tidak akan berjalan dengan lancar.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Apriyansa, A., Bintoro, J., & Sandi, E. (2021). Development of early real-time disaster mitigation warning system landslide with gyroscope ADXL345 sensor. *Journal of Physics: Conference Series*, 2019(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/2019/1/012080>
- Elshami, S., Ibrahim, M. I. M., Abdel-Rahman, M. E., Rahim, H. A., & Mukhalalati, B. (2025). Developing and evaluating a Disaster Management Assessment Tool for Health Care Practitioners. *BMC Emergency Medicine*, 25(1), 12873. <https://doi.org/10.1186/s12873-025-01199-8>
- Erlia, D., Kumalawati, R., & Aristin, N. F. (2017). Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat Dan Pemerintah Menghadapi Bencana Banjir Di Kecamatan Martapura Barat Kabupaten Banjar. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 4(3), 15–24.
- Fadhilah Atelia, S., Hidayat, R., & Rizki, M. F. (2022). Analisis Kesiapsiagaan Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Banjir di Wilayah Kampung Melayu Kota Jakarta Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(14), 297–307. Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.6994835>
- Fath, N., Purnawan, P. W., Laksana, E. P., Kristanto, D., & Saputra, M. A. (2023). Fire Disaster Mitigation Based on Wireless Sensor Network in Densely Populated Area. *Proceedings: ICMERALDA 2023 - International Conference on Modeling and E-Information Research, Artificial Learning and Digital Applications*, (May), 209–213. <https://doi.org/10.1109/ICMERALDA60125.2023.10458159>
- Ginting, A. H., & Dewi, T. (2020). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara Dalam Mewujudkan Desa Tangguh Bencana (Studi Pada Desa Loa Ipuh Dan Desa Purwajawa Kabupaten Kutai Kertanegara). *Jurnal Tatapamong*, 2(1), 17–34. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1233>
- Harsoyo, B., Boer, R., Aldrian, E., Syaufina, L., Bayu Rizky Prayoga, M., Syaifullah, M. D., ... Fadlilah, C. (2023). The role of Weather Modification Technology for forest and land fire disaster mitigation in the perspective of carbon emission reduction in Indonesia. *E3S Web of Conferences*, 467(May), 2025. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202346703001>
- Hidayanto, A. (2020). Pengetahuan dan sikap kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana banjir. *Higeiajournal of Public Health Research and Development*, 4(4), 557–586. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeiahttps://doi.org/10.15294/higeia/v4i4/38362>
- Maulidia, W., Fadhilah, H. A., & Hamid, H. (2020). Pemberdayaan Perajin Industri Rotan Pasca Bencana Oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Palu. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 19–32. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v5i1.1077>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications
- Muhammad Makky Yahusafat, Etin Indrayani, & Kusw oro. (2020). Implementasi Kebijakan

Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kawasan Hutan Gambut Kabupaten Muaro Jambi Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd). *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(4), 675–684. <https://doi.org/10.54783/jv.v12i4.328>

Nurdin, M., & Hartati, N. (2019). *Pendekatan kualitatif dalam penelitian sosial dan kebijakan*. Penerbit Universitas Terbuka.

Shadmaan, M. S., & Popy, S. (2023). An assessment of earthquake vulnerability by multi-criteria decision-making method. *Geohazard Mechanics*, 1(1), 94–102. <https://doi.org/10.1016/j.ghm.2022.11.002>

Simangunsong, F. (2017). *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Taryana, A., El Mahmudi, M. R., & Bkti, H. (2022). Analisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir Di Jakartafile:///Users/macbook/Downloads/literatur 1.pdf. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 302.

Trifianingsih, D., Agustina, D. M., & Tara, E. (2022). KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA KEBAKARAN DI KOTA BANJARMASIN (Community Preparedness to Prevent Fire Disaster in the City of Banjarmasin). *Jurnal Keperawatan Suaka Insan (Jksi)*, 7(1), 7–11. <https://doi.org/10.51143/jksi.v7i1.301>

Yasir, Y., Nurjanah, N., & Samsir, S. (2023). Environmental Communication of Corporate Social Responsibility (CSR) in Fire Disaster Mitigation on Peatlands | Comunicação Ambiental de Responsabilidade Social Corporativa (RSC) na Mitigação de Desastres de Incêndios em Turfeiras. *Anuario Do Instituto de Geociencias*, 46(May), 49559. <https://doi.org/10.11137/1982-3908>

